
Analisis Implementasi Kurikulum Muatan Lokal di MTs Annurain Lonrae Kabupaten Bone.

Hasbullah¹, Sumarni², Nurul Aisyah³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Bone; Indonesia.

Correspondence E-mail*; hasbullah.kakilangit@gmail.com

Submitted: 13/04/2026

Revised: 12/05/2026

Accepted: 30/06/2026

Published: 30/06/2026

Abstract

Local content is an important component of the curriculum that provides educational institutions with opportunities to develop learning based on local potential, uniqueness, language, culture, environment, and community needs. This article analyzes the implementation of the local content curriculum in the context of MTs Annurain Lonrae, Bone Regency, South Sulawesi, through a review of policy documents, school profile data, academic literature on Bugis culture and the Lontaraq script, as well as official sources from local government institutions. The study indicates that MTs Annurain Lonrae has significant potential for developing local content that integrates the Bugis language and Lontaraq script, the history and local wisdom of Bone, local food resources, climate resilience, life skills, and Islamic educational values. Normatively, such opportunities are supported by national policies on local content, guidelines for implementing the madrasah curriculum, policies promoting Lontaraq script literacy in South Sulawesi, and initiatives undertaken by the Government of Bone Regency. However, publicly available data remain insufficient to draw definitive conclusions regarding the actual implementation of local content at the madrasah, particularly in relation to subject teachers, instructional time allocation, teaching materials, facilities, assessment, and funding. Therefore, this article clearly distinguishes between verified facts and implementation recommendations. The recommended model positions the Bugis language and Lontaraq script as the core of the local content curriculum, while the history of Bone, local wisdom, local food, environmental issues, entrepreneurship, and digital literacy are integrated through cross-curricular learning and co-curricular activities. Strengthening implementation requires a needs assessment, teacher competency development, partnerships with the Ministry of Religious Affairs and local government, performance- and portfolio-based assessment, and continuous evaluation.

Keywords

Local content curriculum, Bugis language, Lontara, local wisdom.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

INTRODUCTION

Kurikulum pada hakikatnya merupakan instrumen pendidikan yang menghubungkan tujuan pendidikan dengan pengalaman belajar yang dialami peserta didik. Dalam sistem pendidikan yang beragam secara geografis dan kultural seperti Indonesia, kurikulum tidak dapat hanya memuat pengetahuan yang bersifat nasional dan seragam. Kurikulum juga perlu menyediakan ruang yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan tempat mereka tumbuh, bahasa yang hidup di sekitarnya, nilai yang diwariskan masyarakat, perubahan sosial yang sedang berlangsung, serta masalah nyata yang dihadapi daerahnya. Di sinilah muatan lokal memperoleh kedudukan strategis. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 menempatkan muatan lokal sebagai bahan kajian atau mata pelajaran yang berkaitan dengan potensi dan keunikan lokal, sehingga penyelenggaraannya tidak semata-mata berorientasi pada pelestarian simbol budaya, tetapi pada pengembangan kompetensi peserta didik yang relevan dengan konteks kehidupannya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014).

Kebijakan kurikulum yang lebih mutakhir tetap mempertahankan ruang tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 memberi keleluasaan bagi satuan pendidikan pada jenjang SMP/MTs untuk melaksanakan muatan lokal melalui integrasi ke mata pelajaran lain, integrasi dalam kegiatan kokurikuler, dan/atau sebagai mata pelajaran tersendiri (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025). Fleksibilitas ini penting karena kebutuhan lokal antardaerah tidak sama. Daerah dengan kekuatan bahasa dan sastra daerah dapat memprioritaskan literasi bahasa; wilayah pertanian dapat mengembangkan pembelajaran pangan dan lingkungan; sedangkan daerah dengan warisan sejarah yang kuat dapat menggabungkan sejarah lokal, seni, dan literasi budaya.

Pada madrasah, implementasi kurikulum memiliki karakter khusus karena tidak hanya tunduk pada kebijakan pendidikan umum, tetapi juga berada dalam pembinaan Kementerian Agama. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 menetapkan pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK. Pedoman tersebut kemudian diperbarui melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 yang menekankan pembelajaran mendalam, fleksibilitas satuan pendidikan, penguatan karakter, dan Kurikulum Berbasis Cinta (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024, 2025). Dengan kerangka

ini, muatan lokal pada madrasah tidak seharusnya diposisikan sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai wahana kontekstualisasi pembelajaran agama dan umum dalam kehidupan peserta didik.

MTs Annurain Lonrae merupakan madrasah tsanawiyah swasta di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Data resmi pemerintah mencatat satuan pendidikan ini dengan nama MTSS ANNURAIN LONRAE dan NPSN 40320084 (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, n.d.). Riwayat akreditasi yang tersedia melalui BAN-PDM menunjukkan bahwa madrasah memperoleh peringkat B pada akreditasi tahun 2022 (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, 2022). Fakta tersebut penting untuk memastikan bahwa pembahasan artikel diarahkan pada satuan pendidikan yang dapat diverifikasi, sekaligus menghindari penggunaan informasi sekolah yang tidak memiliki dasar publik yang jelas.

Konteks Kabupaten Bone sangat relevan bagi pengembangan muatan lokal. Bone merupakan salah satu wilayah utama budaya Bugis dengan warisan bahasa, aksara Lontaraq, sejarah lokal, tradisi pappaseng, dan nilai sosial seperti lempu, getteng, ada tongeng, sipakatau, sipakainge, dan sipakalebbi. Pemerintah Kabupaten Bone juga telah mempublikasikan sejarah Bone dan berbagai falsafah lokal yang dapat menjadi sumber awal pembelajaran kontekstual (Pemerintah Kabupaten Bone, 2018b, 2019, 2020). Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2023 menegaskan perhatian terhadap literasi aksara Lontaraq, bahasa, dan sastra daerah (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2023).

Selain aspek budaya, perkembangan kebijakan lokal menunjukkan perluasan makna muatan lokal ke isu lingkungan dan ketahanan kehidupan. Pemerintah Kabupaten Bone pada 2025 meluncurkan muatan lokal pangan lokal untuk ketahanan iklim dan mendorong program pertanian masuk sekolah. Inisiatif ini dikembangkan bersama mitra yang memiliki pengalaman pada isu pengelolaan lanskap dan ketahanan iklim (Pemerintah Kabupaten Bone, 2025a, 2025b; World Agroforestry (ICRAF) Indonesia/Land4Lives, 2025). Pada tahun yang sama, pemerintah daerah juga meluncurkan buku muatan lokal Bahasa Bugis “Mattola Palallo” untuk jenjang SD/MI, yang memperlihatkan adanya ekosistem pengembangan bahan ajar bahasa daerah di Kabupaten Bone (Pemerintah Kabupaten Bone, 2025c).

Persoalannya, keberadaan landasan regulatif dan kekayaan potensi lokal tidak otomatis menjamin implementasi yang efektif. Implementasi kurikulum memerlukan keputusan mengenai tujuan pembelajaran, pemilihan materi, penyiapan guru, alokasi waktu, strategi pembelajaran, media dan sumber belajar, asesmen, pembiayaan, serta keterlibatan pemangku kepentingan. Tanpa pengelolaan yang sistematis, muatan lokal berisiko berubah menjadi kegiatan simbolik yang hanya menampilkan pakaian adat, ungkapan tradisional, atau kegiatan seremonial tanpa menghasilkan kompetensi yang terukur. Sebaliknya, jika dirancang secara kontekstual, muatan lokal dapat menjadi ruang pembelajaran mendalam karena peserta didik belajar dari bahasa, masalah, sumber sejarah, lingkungan, dan pengalaman komunitas yang dekat dengan kehidupan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis kerangka implementasi kurikulum muatan lokal yang relevan untuk MTs Annurain Lonrae. Analisis meliputi profil dan konteks lokal, landasan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran, kompetensi guru, bahan ajar dan sarana, asesmen, integrasi nilai keislaman dan kearifan lokal, faktor pendukung dan penghambat, keterlibatan pemangku kepentingan, serta model penguatan implementasi. Karena dokumen internal madrasah belum tersedia secara publik, artikel ini tidak mengklaim bahwa rekomendasi yang disajikan telah dilaksanakan oleh MTs Annurain Lonrae. Setiap rekomendasi harus divalidasi melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumen sekolah.

METHOD

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian dokumen dan analisis kontekstual. Sumber data terdiri atas peraturan perundang-undangan dan kebijakan pendidikan, profil satuan pendidikan dari basis data pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Bone, sumber pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta artikel ilmiah yang membahas pappaseng dan pembelajaran aksara Lontaraq. Sumber dipilih dengan mempertimbangkan keterlacakan, relevansi langsung terhadap topik, dan otoritas penerbit. Regulasi dan data profil sekolah diprioritaskan dari portal resmi pemerintah, sedangkan literatur budaya dipilih dari jurnal akademik yang dapat ditelusuri.

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, identifikasi fakta terverifikasi mengenai MTs Annurain Lonrae dan konteks wilayahnya. Kedua, pemetaan landasan normatif yang mengatur muatan lokal pada satuan pendidikan dan madrasah. Ketiga, identifikasi sumber daya budaya,

bahasa, lingkungan, dan kebijakan lokal yang berpotensi dikembangkan menjadi isi kurikulum. Keempat, penyusunan model implementasi yang membedakan antara deskripsi faktual dan rekomendasi. Pendekatan ini penting agar artikel tidak mencampurkan data publik dengan asumsi mengenai kondisi internal madrasah. Data seperti jumlah guru, kompetensi Lontaraq guru, alokasi jam aktual, sarana, RKAM, hasil belajar, dan perangkat ajar harus dikumpulkan secara langsung sebelum penelitian empiris menyimpulkan tingkat keberhasilan implementasi.

FINDINGS AND DISCUSSION

Bahasa Bugis, Lontaraq, dan kearifan lokal

Bahasa Bugis merupakan salah satu sumber utama identitas lokal di Kabupaten Bone. Pemerintah Kabupaten Bone pernah mempublikasikan kebijakan daerah yang menekankan pengajaran bahasa daerah selama dua jam pelajaran per minggu, merujuk pada kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemerintah Kabupaten Bone, 2018a). Walaupun penerapan teknis pada madrasah perlu diselaraskan dengan kebijakan Kementerian Agama, dukungan kebijakan daerah menunjukkan bahwa pembelajaran Bahasa Bugis memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat.

Aksara Lontaraq memiliki posisi strategis dalam literasi budaya Bugis. Kajian Hadrawi (2017) serta Hadrawi dan Agus (2017) menunjukkan bahwa pembelajaran aksara Lontara dapat dikembangkan secara bertahap dan memerlukan strategi yang memperhatikan karakteristik sistem tulisan. Implikasinya, pembelajaran Lontaraq pada siswa MTs tidak efektif apabila hanya berupa hafalan bentuk huruf. Pembelajaran perlu bergerak dari pengenalan karakter, pengaitan bunyi dan lambang, pembacaan kata sederhana, penulisan, hingga penggunaan Lontaraq dalam teks kontekstual. Materi juga perlu dibuat bertingkat sesuai kemampuan awal peserta didik.

Kearifan lokal Bugis dapat menjadi sumber pendidikan etika. Abbas (2013) membahas pappaseng sebagai bagian dari kearifan lokal manusia Bugis yang memuat pesan dan nilai sosial. Pemerintah Kabupaten Bone juga mendokumentasikan nilai getteng, lempu, dan ada tongeng serta prinsip sipakatau, sipakainge, dan sipakalebby (Pemerintah Kabupaten Bone, 2018b, 2020). Nilai-nilai tersebut relevan bagi madrasah karena dapat didialogkan dengan pendidikan akhlak, tanggung jawab sosial, kedisiplinan, penghormatan martabat manusia, dan kejujuran.

Warisan budaya juga dapat ditopang oleh sumber sejarah dan sastra. Perdana (2019) menunjukkan

pentingnya naskah La Galigo sebagai identitas budaya Sulawesi Selatan. Dalam pembelajaran MTs, naskah dan tradisi semacam ini dapat digunakan secara proporsional sebagai sumber pengenalan tradisi tekstual, sejarah budaya, dan literasi kritis. Guru perlu membedakan antara teks sastra, tradisi lisan, sumber sejarah, dan interpretasi modern agar siswa tidak menerima semua narasi lokal sebagai fakta sejarah yang setara.

Pedoman kurikulum madrasah

Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 sebagai pedoman implementasi kurikulum pada madrasah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). Kebijakan ini menegaskan kekhasan madrasah serta kebutuhan untuk mengembangkan kurikulum yang memberi ruang pada karakteristik satuan pendidikan. Pada 2025, KMA 1503 diterbitkan sebagai perubahan atas KMA 450 dan memperkuat orientasi pembelajaran mendalam, fleksibilitas, dan Kurikulum Berbasis Cinta (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025).

Bagi muatan lokal, implikasi kebijakan tersebut adalah perlunya integrasi antara identitas lokal dan karakter madrasah. Materi Bahasa Bugis tidak harus berdiri terpisah dari tujuan pendidikan Islam. Nilai lempu dapat dikaji bersamaan dengan konsep kejujuran; sipakatau dapat didialogkan dengan penghormatan terhadap martabat manusia; kepedulian terhadap pangan dan lingkungan dapat dihubungkan dengan amanah manusia dalam menjaga kehidupan. Integrasi semacam ini perlu dilakukan secara akademik dan tidak menyamakan konsep budaya dengan konsep agama secara simplistik.

Kurikulum Berbasis Cinta memberi ruang konseptual untuk menghubungkan pembelajaran lokal dengan cinta kepada Tuhan, sesama, ilmu pengetahuan, lingkungan, dan tanah air. Dengan demikian, muatan lokal dapat menjadi laboratorium konkret bagi pengembangan karakter, bukan sekadar tambahan materi. Namun, pengintegrasian harus tetap berangkat dari tujuan pembelajaran dan bukti aktivitas siswa. Nilai hanya akan bermakna apabila siswa berlatih menggunakannya dalam diskusi, pemecahan masalah, proyek, dan refleksi.

Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2023). Kebijakan ini memperkuat posisi Lontaraq sebagai bagian dari literasi daerah yang perlu

dilestarikan dan dikembangkan. Bagi MTs di Kabupaten Bone, perda tersebut merupakan konteks kebijakan yang mendukung pengembangan kompetensi Lontaraq, meskipun implementasi teknis dalam struktur madrasah tetap memerlukan penyesuaian dengan kebijakan Kementerian Agama.

Pemerintah Kabupaten Bone juga memperlihatkan komitmen terhadap pengembangan Bahasa Bugis melalui peluncuran buku muatan lokal “Mattola Palallo” untuk SD/MI pada 2025 (Pemerintah Kabupaten Bone, 2025c). Walaupun buku tersebut bukan buku teks untuk MTs, keberadaannya dapat digunakan untuk memetakan kompetensi prasyarat peserta didik yang berasal dari MI atau SD. MTs dapat mengembangkan tahap lanjut berupa percakapan yang lebih kompleks, membaca dan menulis Lontaraq, dokumentasi tradisi lisan, penulisan dwibahasa, dan produksi konten digital.

Dalam bidang lingkungan dan pangan, Pemerintah Kabupaten Bone mengembangkan muatan lokal pangan lokal untuk ketahanan iklim bersama ICRAF/Land4Lives (Pemerintah Kabupaten Bone, 2025b; World Agroforestry (ICRAF) Indonesia/Land4Lives, 2025). Program ini penting karena memperlihatkan bahwa muatan lokal dapat bergerak melampaui bahasa dan budaya menuju persoalan ketahanan hidup. Pada madrasah, materi tersebut dapat diadaptasi ke proyek IPA, IPS, Matematika, Prakarya, dan kokurikuler dengan tetap mempertimbangkan kewenangan serta dokumen kurikulum madrasah.

Perencanaan Implementasi Kurikulum Muatan Lokal

1. Analisis kebutuhan

Perencanaan seharusnya dimulai dari analisis kebutuhan, bukan dari penetapan daftar materi. Analisis kebutuhan perlu menjawab tiga pertanyaan: kompetensi lokal apa yang perlu dimiliki siswa MTs di Lonrae; sumber belajar apa yang nyata dan dapat diakses; serta masalah lokal apa yang relevan bagi kehidupan peserta didik. Untuk Bahasa Bugis, misalnya, sekolah tidak boleh mengasumsikan semua siswa memiliki tingkat kemampuan yang sama. Sebagian mungkin penutur aktif, sebagian memahami tetapi jarang berbicara, sedangkan sebagian lain lebih dominan menggunakan Bahasa Indonesia. Baseline diperlukan agar kurikulum tidak terlalu mudah bagi satu kelompok dan terlalu sulit bagi kelompok lain.

Analisis kebutuhan juga harus mencakup guru. Sekolah perlu memetakan guru yang mampu berbahasa Bugis, membaca dan menulis Lontaraq, memiliki pengalaman mengembangkan proyek,

atau mempunyai jejaring dengan tokoh budaya. Data tersebut akan menentukan apakah madrasah dapat menyelenggarakan mata pelajaran mandiri, membutuhkan model co-teaching, atau perlu bermitra dengan narasumber eksternal. Karena data ini belum tersedia secara publik, pemetaan SDM merupakan pekerjaan awal yang harus dilakukan sebelum program disahkan.

Aspek sarana perlu dinilai secara realistis. Pembelajaran muatan lokal tidak selalu membutuhkan laboratorium khusus. Kelas, perpustakaan, telepon genggam yang dikelola sesuai aturan sekolah, perangkat audio, halaman, pasar, rumah keluarga, dan ruang publik dapat menjadi sumber belajar. Akan tetapi, program tetap memerlukan inventaris yang jelas agar guru mengetahui sumber mana yang tersedia dan aman digunakan. Perencanaan yang baik akan menghindari ketergantungan pada pengadaan besar yang belum tentu berkaitan langsung dengan hasil belajar.

2. Penentuan tujuan dan struktur program

Tujuan program perlu dirumuskan sebagai kompetensi, bukan slogan. Rumusan “melestarikan budaya Bugis” terlalu luas jika tidak diterjemahkan ke hasil belajar. Pada kelas VII, siswa dapat ditargetkan mampu melakukan percakapan dasar, mengenali aksara Lontaraq, dan menceritakan lingkungan lokal. Pada kelas VIII, siswa dapat membaca dan menulis teks sederhana, mendokumentasikan pappaseng atau cerita keluarga, serta menganalisis isu pangan lokal. Pada kelas IX, siswa dapat menghasilkan karya digital dwibahasa, penelitian mini sejarah lokal, atau proyek kewirausahaan dan lingkungan. Dengan progresi seperti ini, sekolah memiliki bukti perkembangan tiga tahun.

Model struktur yang direkomendasikan adalah satu muatan lokal inti dan sejumlah tema integratif. Bahasa Bugis-Lontaraq dapat menjadi mata pelajaran tersendiri karena memiliki dasar kebijakan dan kebutuhan kompetensi yang jelas. Sejarah Bone, kearifan lokal, pangan, ketahanan iklim, kewirausahaan, dan literasi digital dapat ditempatkan pada modul lintas mata pelajaran serta kokurikuler. Model ini memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan kebijakan kurikulum nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, 2025) dan menghindari penambahan beban belajar yang tidak perlu.

3. Tim pengembang kurikulum

Pengembangan kurikulum tidak seharusnya dibebankan kepada satu guru. Tim perlu melibatkan

kepala madrasah, pengelola kurikulum, guru lintas mata pelajaran, pengawas madrasah, komite, perwakilan orang tua, narasumber budaya, dan mitra eksternal. Kolaborasi diperlukan karena muatan lokal memiliki dimensi pedagogis, linguistik, budaya, dan kebijakan sekaligus. Guru Bahasa Indonesia dapat membantu strategi literasi; guru IPS dapat membantu metode sejarah lokal; guru IPA dapat mengembangkan proyek lingkungan; guru agama dapat mengintegrasikan nilai; sedangkan ahli Bugis Lontaraq membantu akurasi materi.

Pemerintah Kabupaten Bone telah menunjukkan pola kolaboratif dalam pengembangan muatan lokal pangan lokal dan ketahanan iklim yang melibatkan dinas, sekolah, guru, dan mitra teknis (World Agroforestry (ICRAF) Indonesia/Land4Lives, 2025). Pola serupa dapat diadaptasi pada tingkat madrasah. MTs Annurain Lonrae dapat membangun kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, perpustakaan daerah, perguruan tinggi, tokoh budaya, dan komunitas yang memiliki kompetensi relevan.

Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal

1. Bahasa Bugis dan Lontaraq sebagai inti

Pembelajaran Bahasa Bugis sebaiknya berorientasi pada penggunaan bahasa, bukan hanya pengetahuan tentang bahasa. Siswa perlu berlatih menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam situasi yang relevan. Aktivitas dapat berupa dialog sekolah, wawancara keluarga, pembuatan kamus tematik, pidato pendek, rekaman cerita, dan penulisan teks dwibahasa. Guru perlu memerhatikan variasi kemampuan agar siswa yang belum fasih tidak merasa dipermalukan atau dianggap kurang memiliki identitas lokal.

Pembelajaran Lontaraq perlu bersifat bertahap. Hadrawi (2017) dan Hadrawi dan Agus (2017) menekankan pentingnya strategi penguasaan aksara yang sistematis. Pada tahap awal, siswa mengenali bentuk aksara dan kaitannya dengan bunyi. Tahap berikutnya berfokus pada pembacaan dan penulisan kata serta kalimat sederhana. Setelah itu, siswa dapat mengalihaksarakan teks pendek, membuat poster dua aksara, atau menulis nama tempat dan ungkapan lokal. Penggunaan Lontaraq dalam produk nyata akan memberi makna lebih kuat daripada latihan salin tanpa konteks.

Digitalisasi dapat menjadi sarana pelestarian. Peserta didik dapat membuat video pengucapan, kamus mini, poster Lontaraq, peta cerita keluarga, atau katalog digital istilah lokal. Pendekatan ini

mengubah asumsi bahwa budaya lokal selalu berlawanan dengan teknologi. Justru teknologi dapat menjadi media agar generasi muda menggunakan kembali bahasa dan aksara daerah pada konteks baru.

2. Sejarah Bone dan literasi sumber

Sejarah Bone dapat digunakan untuk membangun literasi sejarah dan keterampilan berpikir kritis. Pemerintah Kabupaten Bone menyediakan publikasi sejarah daerah yang dapat digunakan sebagai titik awal (Pemerintah Kabupaten Bone, 2019). Namun, siswa sebaiknya tidak hanya diminta menghafal urutan raja atau peristiwa. Mereka perlu diperkenalkan pada cara membedakan sumber primer, sumber sekunder, tradisi lisan, dan interpretasi. Aktivitas dapat berupa pembuatan garis waktu, perbandingan dua sumber, wawancara keluarga, atau pemetaan tempat yang memiliki nilai sejarah.

Penggunaan sumber sastra dan naskah juga dapat memperluas literasi. Kajian Perdana (2019) tentang La Galigo menunjukkan bahwa naskah tersebut memiliki kedudukan penting dalam identitas budaya Sulawesi Selatan. Di tingkat MTs, materi dapat disederhanakan melalui pengenalan fungsi naskah, konteks budaya, dan nilai dokumenter, tanpa memaksakan kajian filologis yang terlalu kompleks. Yang penting adalah siswa memahami bahwa kebudayaan lokal memiliki tradisi tulisan dan dokumentasi yang kaya.

3. Pappaseng dan pendidikan etika kritis

Pappaseng dapat menjadi bahan pembelajaran yang kuat apabila digunakan sebagai teks untuk dianalisis. Abbas (2013) menunjukkan bahwa pappaseng merupakan bagian dari kearifan lokal Bugis yang menyimpan nilai dan pesan sosial. Guru dapat meminta siswa mencari pappaseng dari keluarga, menuliskan sumbernya, membandingkan versi, menginterpretasikan makna, dan menilai relevansinya dengan kehidupan sekarang. Aktivitas semacam ini mengembangkan bahasa, riset sederhana, literasi sumber, dan penalaran moral secara bersamaan.

Nilai lempu, getteng, ada tongeng, sipakatau, sipakainge, dan sipakalebba dapat diangkat melalui studi kasus. Misalnya, siswa membahas penyebaran informasi palsu di grup kelas melalui perspektif ada tongeng dan etika Islam; konflik antarteman melalui sipakatau dan sipakainge; atau konsistensi belajar melalui getteng. Pemerintah Kabupaten Bone mendokumentasikan makna nilai

tersebut dalam publikasi budaya daerah (Pemerintah Kabupaten Bone, 2018b, 2020). Pendekatan studi kasus mencegah kearifan lokal berubah menjadi slogan yang hanya dihafal.

4. Pangan lokal, ketahanan iklim, dan kewirausahaan

Pengembangan muatan lokal pangan lokal untuk ketahanan iklim di Kabupaten Bone memberikan peluang bagi madrasah untuk mengaitkan pengetahuan lokal dengan sains dan kehidupan sehari-hari (Pemerintah Kabupaten Bone, 2025b; World Agroforestry (ICRAF) Indonesia/Land4Lives, 2025). Siswa dapat memetakan bahan pangan yang dikonsumsi keluarga, menelusuri asalnya, menganalisis perubahan harga, mempelajari nilai gizi, mengidentifikasi sampah makanan, dan memahami hubungan iklim dengan produksi pangan. Kegiatan ini dapat mengintegrasikan IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Prakarya.

Kewirausahaan sederhana dapat dikembangkan sebagai tahap lanjutan. Siswa dapat merancang kemasan, menghitung biaya produksi, membuat promosi digital, atau melakukan simulasi penjualan produk lokal. Tujuan utamanya bukan menjadikan siswa sebagai tenaga kerja spesialis, melainkan melatih kreativitas, literasi finansial, komunikasi, kerja sama, dan etika. Produk lokal dapat menjadi objek belajar yang dekat dan mudah dipahami.

Bahan Ajar, Media, Kompetensi Guru, dan Sarana

1. Bahan ajar

Bahan ajar muatan lokal sebaiknya tidak hanya bergantung pada satu buku. Ekosistem bahan dapat terdiri atas buku Bahasa Bugis yang dikembangkan pemerintah daerah, publikasi sejarah Bone, artikel akademik, koleksi perpustakaan daerah, dokumentasi keluarga, rekaman narasumber, serta karya siswa. Buku “Mattola Palallo” yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Bone untuk SD/MI dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk melihat kompetensi prasyarat, tetapi materi MTs perlu dikembangkan pada tingkat yang lebih tinggi (Pemerintah Kabupaten Bone, 2025).

Setiap sumber lokal harus melalui proses kurasi. Tradisi lisan, misalnya, penting sebagai sumber pengalaman komunitas, tetapi tidak otomatis diperlakukan sebagai fakta sejarah tunggal. Narasumber perlu dicatat identitas dan konteks informasinya; siswa didorong membandingkan cerita dengan dokumen atau sumber lain. Kurasi ini sekaligus menjadi pendidikan literasi informasi.

2. Kompetensi guru

Kompetensi guru merupakan faktor penentu utama. Guru yang fasih berbahasa Bugis belum tentu memiliki keterampilan mengajarkan bahasa; sebaliknya, guru yang baik secara pedagogis belum tentu menguasai Lontaraq. Karena itu, pengembangan SDM perlu menggabungkan penguasaan konten dan pedagogi. Model co-teaching dapat digunakan apabila sekolah belum memiliki guru khusus. Guru internal memegang kendali pedagogis, sedangkan ahli bahasa atau budaya membantu validasi dan pengayaan konten.

Program pengembangan guru sebaiknya berkelanjutan, bukan hanya seminar satu kali. Siklus pelatihan dapat terdiri atas pemahaman regulasi, penguatan Bahasa Bugis-Lontaraq, pembelajaran berbasis proyek, asesmen kinerja, etika dokumentasi budaya, lesson study, dan produksi bahan ajar. Hasil pelatihan harus terlihat pada perubahan modul dan praktik kelas. Setiap guru pengampu dapat ditargetkan menghasilkan satu unit pembelajaran yang diuji, diamati oleh kolega, direfleksikan, dan diperbaiki.

3. Sarana dan media

Sarana tidak perlu menjadi alasan menunda implementasi apabila sekolah memiliki fasilitas dasar. Papan tulis, kertas, perangkat audio, perpustakaan, lingkungan sekitar, dan telepon genggam yang digunakan dengan aturan aman dapat mendukung banyak aktivitas. Sarana yang lebih khusus dapat dikembangkan bertahap setelah kebutuhan terbukti. Prinsip utama adalah kesesuaian sarana dengan tujuan belajar, bukan banyaknya peralatan.

Untuk proyek lingkungan dan pangan, keterbatasan lahan dapat diatasi dengan alternatif seperti pot, hidroponik sederhana, observasi pasar, survei keluarga, dokumentasi rantai pangan, atau desain kampanye. Karena data luas lahan dan fasilitas MTs Annurain Lonrae belum terverifikasi secara publik, rekomendasi sarana harus diputuskan berdasarkan observasi langsung, bukan asumsi.

Asesmen dan Evaluasi

1. Asesmen pembelajaran

Asesmen muatan lokal perlu mengukur pengetahuan, keterampilan, penalaran, dan produk. Tes pilihan ganda dapat digunakan secara terbatas untuk kosakata atau konsep, tetapi tidak cukup

untuk menilai kemampuan berbicara Bugis, membaca Lontaraq, melakukan wawancara, atau menyusun proyek. Penilaian kinerja, portofolio, rubrik, jurnal refleksi, dan presentasi perlu menjadi bagian penting dari sistem asesmen.

Asesmen diagnostik dilakukan sebelum program atau awal tingkat untuk mengetahui kemampuan siswa. Asesmen formatif dilakukan selama proses melalui rekaman audio pendek, pembacaan teks, latihan menulis, exit ticket, kuis, dan umpan balik teman sebaya. Asesmen sumatif dapat berupa performa berbicara, portofolio Lontaraq, proyek sejarah lokal, atau pameran karya. Pola ini sejalan dengan kebutuhan pembelajaran yang berorientasi pada proses dan bukti kompetensi.

Portofolio tiga tahun sangat direkomendasikan. Setiap siswa dapat menyimpan rekaman kemampuan berbicara, contoh tulisan Lontaraq, hasil wawancara, refleksi nilai, proyek pangan, produk digital, dan evaluasi diri. Pada akhir kelas IX, portofolio memungkinkan sekolah melihat pertumbuhan individual, bukan sekadar membandingkan siswa satu dengan siswa lain.

2. Evaluasi implementasi program

Evaluasi program harus membedakan antara kurikulum tertulis dan kurikulum yang benar-benar dilaksanakan. Madrasah perlu memeriksa apakah alokasi jam berjalan, apakah modul digunakan, apakah proyek terlaksana, apakah guru memperoleh dukungan, dan apakah siswa menunjukkan perkembangan. Data dapat diambil dari jurnal mengajar, observasi, portofolio, hasil asesmen, wawancara guru, survei siswa, dan umpan balik orang tua.

Indikator keberhasilan tidak hanya berupa nilai rata-rata. Program dianggap berhasil apabila terdapat peningkatan kemampuan individual, kehadiran dan partisipasi siswa yang baik, karya yang berkualitas, keterlibatan mitra, peningkatan kompetensi guru, tersedianya perangkat ajar, dan integrasi program ke dokumen Kurikulum Madrasah serta RKAM. Evaluasi tahunan kemudian digunakan untuk merevisi materi yang terlalu sulit, memperbaiki metode, dan menyesuaikan target.

Madrasah memiliki peluang besar untuk mengembangkan dialog antara nilai keislaman dan kearifan lokal. Integrasi yang dimaksud bukan pencampuran konsep tanpa batas, melainkan penggunaan pengalaman budaya sebagai konteks untuk memahami nilai agama dan sebaliknya. Lempu dapat menjadi konteks pembahasan kejujuran; sipakatau dapat dikaitkan dengan

penghormatan terhadap sesama; kepedulian terhadap pangan dan lingkungan dapat dihubungkan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga kehidupan.

Kurikulum Berbasis Cinta yang ditekankan dalam kebijakan Kementerian Agama memberi kerangka untuk mengintegrasikan cinta kepada Tuhan, diri dan sesama, ilmu, lingkungan, dan tanah air (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025). Dalam pembelajaran, siswa dapat menelaah bagaimana nilai lokal mendukung atau perlu dikritisi melalui prinsip keislaman. Pendekatan ini membangun kemampuan refleksi, bukan sekadar memperbanyak slogan karakter.

Integrasi juga dapat dilakukan melalui mata pelajaran. Akidah Akhlak dapat memakai kasus sosial lokal; Fikih dapat menggunakan contoh transaksi produk lokal; Qur'an-Hadis dapat membahas amanah dan lingkungan; SKI dapat membuka ruang kajian sejarah Islamisasi masyarakat Bugis dengan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; Bahasa Indonesia dapat menggunakan teks lokal; IPS dapat mengkaji sejarah Bone; IPA dapat membahas pangan dan perubahan lingkungan. Dengan model lintas mata pelajaran, muatan lokal menjadi bagian dari ekosistem kurikulum, bukan pulau yang terpisah.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung pertama adalah kekayaan budaya Bugis-Bone. Bahasa, Lontaraq, sejarah, sastra, pappaseng, nilai sosial, dan tradisi lisan menyediakan sumber belajar yang luas. Kedua, terdapat dukungan regulatif dari kebijakan nasional, Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Bone. Ketiga, pemerintah daerah telah mengembangkan inisiatif konkret berupa buku Bahasa Bugis dan muatan lokal pangan lokal untuk ketahanan iklim (Pemerintah Kabupaten Bone, 2025).

Faktor pendukung berikutnya adalah potensi kemitraan. Madrasah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, perpustakaan, tokoh budaya, pemerintah daerah, dan komunitas. Kolaborasi mengurangi ketergantungan pada satu guru dan memperkaya sumber belajar. Selain itu, teknologi digital memberi peluang dokumentasi budaya yang relatif murah dan menarik bagi remaja.

2. Faktor penghambat

Penghambat pertama adalah kemungkinan keterbatasan guru yang menguasai kombinasi konten

lokal dan pedagogi. Jika hanya satu orang memiliki kemampuan Lontaraq, program menjadi rentan. Penghambat kedua adalah bahan ajar untuk tingkat MTs yang belum tentu tersedia dalam bentuk siap pakai. Bahan SD/MI tidak dapat langsung digunakan tanpa peningkatan kedalaman. Penghambat ketiga adalah risiko beban kurikulum apabila sekolah menambah terlalu banyak mata pelajaran baru.

Penghambat keempat adalah folklorisasi, yaitu ketika program berhenti pada seremonial, pakaian adat, atau hafalan ungkapan tanpa kompetensi. Penghambat kelima adalah romantisasi budaya, yaitu kecenderungan menganggap semua praktik lama selalu benar. Kurikulum harus memberi ruang kritik, dialog dengan nilai Islam, ilmu pengetahuan, Pancasila, dan pengalaman siswa. Penghambat keenam adalah ketidakjelasan data internal; keputusan tanpa baseline dapat menghasilkan program yang tidak sesuai kebutuhan.

Penghambat lain adalah koordinasi kewenangan. MTs berada dalam pembinaan Kementerian Agama, sementara sebagian program muatan lokal dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bone. Solusinya bukan menutup diri terhadap program daerah, tetapi membangun mekanisme adaptasi dan koordinasi agar bahan yang baik dapat digunakan secara sah dan sesuai dengan dokumen kurikulum madrasah.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Kepala madrasah memiliki peran sebagai pengarah kebijakan, penjamin keberlanjutan, dan pengelola sumber daya. Kepala madrasah perlu memastikan program masuk ke dokumen resmi, pembagian tugas, jadwal, dan RKAM. Guru berperan sebagai perancang pengalaman belajar dan evaluator. Peserta didik harus diposisikan sebagai pelaku aktif yang meneliti, mewawancarai, memproduksi, dan merefleksikan, bukan hanya penerima informasi.

Orang tua dan keluarga merupakan sumber penting, terutama untuk bahasa, tradisi lisan, resep, cerita sejarah keluarga, dan perubahan praktik budaya. Namun keterlibatan mereka perlu diatur secara etis, termasuk persetujuan perekaman dan penggunaan data. Komite madrasah dapat membantu membangun dukungan sosial dan kemitraan. Tokoh budaya dan penutur ahli berperan memvalidasi materi, sedangkan perguruan tinggi dapat membantu metodologi, pengembangan modul, dan evaluasi.

Pemerintah daerah dan Kantor Kementerian Agama memiliki posisi strategis untuk menyelaraskan kebijakan. Dinas Pendidikan Kabupaten Bone memiliki pengalaman pengembangan muatan lokal dan bahan ajar, sedangkan Kementerian Agama memiliki kewenangan pembinaan madrasah. Kolaborasi antarlembaga dapat mencegah duplikasi dan memperluas akses guru terhadap pelatihan serta sumber belajar.

CONCLUSION

Implementasi kurikulum muatan lokal di MTs Annurain Lonrae memiliki peluang yang kuat karena didukung oleh konteks budaya Bugis-Bone, kebijakan nasional, pedoman kurikulum madrasah, kebijakan literasi Lontaraq Sulawesi Selatan, serta inisiatif Pemerintah Kabupaten Bone. Muatan lokal dapat dikembangkan sebagai ruang pembelajaran yang menghubungkan Bahasa Bugis-Lontaraq, sejarah dan kearifan lokal, pangan, ketahanan iklim, teknologi, kewirausahaan, dan nilai pendidikan Islam. Namun, bukti publik yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bagaimana implementasi aktual berlangsung di madrasah.

Model paling realistis adalah menempatkan Bahasa Bugis-Lontaraq sebagai inti muatan lokal, sedangkan sejarah Bone, pappaseng, kearifan lokal, pangan, lingkungan, dan kewirausahaan diintegrasikan melalui pembelajaran lintas mata pelajaran dan kokurikuler. Strategi ini sesuai dengan fleksibilitas kebijakan kurikulum dan menghindari penambahan banyak mata pelajaran yang dapat membebani siswa.

Penguatan implementasi memerlukan lima langkah utama. Pertama, melakukan audit kebutuhan dan baseline. Kedua, membentuk tim pengembang yang melibatkan guru, pengawas, komite, masyarakat, dan mitra. Ketiga, mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan lesson study. Keempat, menggunakan asesmen kinerja dan portofolio untuk melihat pertumbuhan kompetensi siswa. Kelima, mengevaluasi program secara berkala dan mengintegrasikan hasilnya ke Kurikulum Madrasah serta RKAM.

Untuk kepentingan penelitian ilmiah, rekomendasi dalam artikel ini perlu diuji melalui studi kasus lapangan. Fokus penelitian dapat diarahkan pada kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, kompetensi guru, pengalaman belajar siswa, keterlibatan masyarakat, dan faktor yang mendukung atau menghambat implementasi. Dengan pendekatan tersebut, kajian tentang MTs Annurain Lonrae dapat bergerak dari analisis normatif menuju bukti empiris yang benar-benar

menggambarkan praktik kurikulum di madrasah.

REFERENCES

- Abbas, I. (2013). Pappaseng: Kearifan lokal manusia Bugis yang terlupakan. *Sosiohumaniora*, 15(3), 272–284. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i3.5752>
- Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. (2022). Data satuan pendidikan MTSS Annurain Lonrae, NPSN 40320084. <https://ban-pdm.id/satuanpendidikan/40320084>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2025). Kecamatan Tanete Riattang Timur dalam angka 2025. <https://bonekab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/a46ea1b4c3dcf9cc75f606d8/kecamatan-tanete-riattang-timur-dalam-angka-2025.html>
- Hadrawi, M. (2017). Strategi dasar penguasaan aksara Lontara secara efektif berdasarkan metode SULO. *Salingka*, 14(2), 111–123. <https://doi.org/10.26499/salingka.v14i2.155>
- Hadrawi, M., & Agus, N. (2017). Karakteristik aksara Lontara dan kaitannya dengan strategi pembelajaran membaca berdasarkan metode SULO. *Sawerigading*, 23(2), 287–297. <https://sawerigading.kemdikbud.go.id/index.php/sawerigading/article/download/460/302>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-pedoman-implementasi-kurikulum-bagi-madrasah-raEXW>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. <https://bengkulu.kemenag.go.id/data/view/26/keputusan-menteri-agama-republik-indonesia>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013. <https://peraturan.go.id/id/permendikbud-no-79-tahun-2014>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/322506/permendikdasmen-no-13-tahun-2025>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/344196/permendikdasmen-no-1-tahun-2026>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (n.d.). Data pendidikan MTSS Annurain Lonrae, NPSN 40320084. Referensi Data Pendidikan. <https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/pendidikan/npsn/40320084>
- Pemerintah Kabupaten Bone. (2018a). Pergub Sulsel: Bahasa daerah wajib diajarkan 2 jam pelajaran per minggu. <https://bone.go.id/2018/11/25/pergub-sulsel-bahasa-daerah-wajib-diajarkan-2-jam-pelajaran-per-minggu/>
- Pemerintah Kabupaten Bone. (2018b). Menjaga Kamtibmas dengan prinsip Sipakatau, Sipakainge,

- Sipakalebbi. <https://bone.go.id/2018/11/27/menjaga-kamtibmas-dengan-prinsip-sipakatausipakainge-sipakalebbi/>
- Pemerintah Kabupaten Bone. (2019). Sejarah Kabupaten Bone. <https://bone.go.id/2019/12/05/sejarah-kabupaten-bone/>
- Pemerintah Kabupaten Bone. (2020). Butir-butir dalam falsafah Bugis: Getteng, lempu, ada tongeng. <https://bone.go.id/2020/12/27/butir-butir-dalam-falsafah-bugis-getteng-lempu-ada-tongeng/>
- Pemerintah Kabupaten Bone. (2025a). Bupati Bone hadir kegiatan pertanian masuk sekolah di SMPN 3 Watampone. <https://bone.go.id/2025/05/15/bupati-bone-hadiri-kegiatan-pertanian-masuk-sekolah-di-smpn-3-watampone/>
- Pemerintah Kabupaten Bone. (2025b). Peluncuran muatan lokal ketahanan iklim di Kabupaten Bone. <https://bone.go.id/2025/07/23/peluncuran-muatan-lokal-ketahanan-iklim-di-kabupaten-bone/>
- Pemerintah Kabupaten Bone. (2025c). Wakil Bupati Bone luncurkan buku muatan lokal Bahasa Daerah Bugis “Mattola Palallo”. <https://bone.go.id/2025/09/25/wakil-bupati-bone-luncurkan-buku-muatan-lokal-bahasa-daerah-bugis-mattola-palallo/>
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Literasi Aksara Lontaraq, Bahasa dan Sastra Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/336354>
- Perdana, A. (2019). Naskah La Galigo: Identitas budaya Sulawesi Selatan di Museum La Galigo. Pangadereng, 5(1), 116–132. <https://jurnalpangadereng.kemdikbud.go.id/index.php/pangadereng/article/download/16/5>
- World Agroforestry (ICRAF) Indonesia/Land4Lives. (2025). Peluncuran muatan lokal pangan lokal untuk ketahanan iklim di Kabupaten Bone. <https://lahanuntukkehidupan.id/kegiatan/peluncuran-muatan-lokal-pangan-lokal-untuk-ketahanan-iklim-di-kabupaten-bone/>

.